Raperda Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Pasuruan 2021, Disetujui Jadi Perda

Senin, 20 Juni 2022

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021 telah disetujui menjadi Perda. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Bupati Pasuruan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (20/06/2022).

Meskipun disetujui, beberapa Komisi memberikan rekomendasi kepada Pemkab Pasuruan terkait isu yang bergulir. Salah satunya adalah isu mengenai penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, yang diangkat oleh Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Komisi I memandang posisi tenaga honorer sangat vital, baik di posisi teknis, profesi, maupun administratif. Oleh karena itu, mereka meminta Pemkab Pasuruan untuk melakukan pendataan, penataan, dan pemetaan pegawai non ASN serta segera mengirimkan surat kepada Kementrian PAN-RB agar tenaga honorer yang memenuhi ketentuan dapat mengikuti seleksi ASN/PPPK atau tetap dipertahankan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Bupati Irsyad Yusuf menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, pendapat, dan koreksi dari seluruh Komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan dan berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ia mengakui bahwa tenaga honorer di Pemkab Pasuruan sangat banyak dan keberadaan mereka sangat diperlukan untuk menunjang kinerja para PNS.

Pemkab Pasuruan akan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan isu tenaga honorer dan memastikan kesejahteraan mereka terjamin.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.